
Tata Cara Peralihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Akta

MEMBANGUN BERSAMA RUMAH AGRARIA

Sistem Hukum Benda Nasional

Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum

Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan

Awas Jangan Beli Tanah Sengketa

Property Top Secret Buku Pintar Bisnis & Investasi Properti di Era Revolusi Industri 4.0

HUKUM AGRARIA

ASPEK HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

SERI IKHTISAR HUKUM EKONOMI DAN BISNIS BUKU I: PENGANTAR HUKUM EKONI

Hukum Agraria

Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia

Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah

TEORI DAN PRAKTEK HAK TANGGUNGAN

Hukum Lelang

Awas Jangan Beli Tanah Sengketa

Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya

Sari laporan penelitian dan survei, 1950-1980

Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh?

HUKUM AGRARIA KONTEMPORER : Relasinya dengan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

HUKUM PERTANAHAN DALAM TINDAKAN Himpunan Peraturan Agraria Terkait Hak Atas Tanah

97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti

Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia

Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking di Indonesia

SELUK BELUK PERPAJAKAN INDONESIA

Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia Pengaturan Serta Prosedur Dan Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia

Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)

Hukum Agraria Indonesia

Pengembangan Wilayah

PANDUAN MENGURUS SERTIFIKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Hukum Pertanahan

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia

Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya

Ke Mana Hartaku akan Berlabuh: Memahami Harta Warisan yang Ditinggalkan

Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)

Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah

Tata Cara Peralihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Akta

Downloaded from blog.gmercyyu.edu by guest

HEZEKIAH REILLY

MEMBANGUN BERSAMA RUMAH AGRARIA CV AMAL SALEH

Dalam buku ini dibahas tentang Konsep Dasar Hukum pada umumnya dan konsep dasar Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Perdata dan Hukum Jaminan sebagai dasar dari hukum ekonomi dan bisnis.

Sistem Hukum Benda Nasional Penerbit Alumnus

Materi dari buku ini mengacu pada peraturan-peraturan terbaru dan terdiri dari dua belas bab, yang meliputi Bab I mengenai Dasar-dasar perpajakan, Bab II dibahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan Umum dibahas di Bab III, Bab IV dibahas tentang PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26, PPh Pasal 22 dibahas pada Bab V, sedangkan PPh Pasal 23 pada Bab VI, PPh Pasal 24 pada Bab VII, Bab VIII dibahas tentang PPh Pasal 25, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibahas pada Bab IX, BPHTB dibahas pada Bab X, sementara Bab XI dibahas tentang Bea Meterai kemudian terakhir Bab XII tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM, dan dilengkapi suplemen berupa Book Chapter tentang Tax Amnesty dan Tax Avoidance. Buku ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan buku sebelumnya untuk menyesuaikan dan mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku. Setiap bab dibahas mengenai pengertian, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan pajak dan disertai dengan contoh perhitungan pajaknya dan latihan-latihan soal pada tiap akhir bab, sehingga mahasiswa dan pembaca dapat memahami peraturan-peraturan yang mengikat tentang penerapan perhitungannya. Buku ini juga diberikan lampiran link untuk mengakses bentuk formulir-formulir, SPT Masa, SPT WP OP dan SPT WP Badan, e Filing, e Billing, e payment, dan E Nofa, e Bupot.

Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum Kencana

Isi buku ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku, disusun dan disajikan secara lengkap, rinci, runtut, dan runut sehingga memudahkan para pembaca memahami tentang pengaturan dan prosedur serta tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selama ini belum ada buku yang memuat pengaturan, prosedur, dan tata cara pengadaan tanah secara lengkap dan terperinci. Buku ini terdiri atas tiga bagian, yaitu tentang Perkembangan Peraturan Perolehan Tanah (dari Pencabutan Hak Atas Tanah ke Pembebasan Tanah sampai Pengadaan Tanah); tentang Pengaturan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan tentang Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Manfaat yang ingin diperoleh dari buku ini, baik bagi kepentingan akademik maupun kepentingan praktis. Untuk instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum, buku ini sangat membantu memahami pengaturan, prosedur, dan tata cara memperoleh tanah melalui pengadaan tanah. Untuk masyarakat umum khususnya yang terkena proses pengadaan tanah, buku ini membantu pemahaman bagaimana pengadaan tanah itu dilakukan dan sekaligus memberikan informasi tentang hak-hak dan kewajiban yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan. Buku ini juga ditujukan untuk para mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bahan untuk mengikuti mata kuliah Hukum Agraria dan khususnya mata kuliah Hukum Pengadaan Tanah. Buku persembahkan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI

Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan Kencana

Pengantar Strategi Kreatif Advertising Era Digital

Awas Jangan Beli Tanah Sengketa Elex Media Komputindo

Buku ini menegaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah di Indonesia, baik hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum perdata barat. Dikaji pula macam-macam pemindahan hak atas tanah dan peralihan (konversi) hak atas tanah setelah Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) diberlakukan. Di samping itu, dipelajari tentang lembaga hukum pendaftaran tanah terkait sistem pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, aturan-aturan pendaftaran tanah, pejabat pendaftaran tanah, dan berbagai permasalahan yang kerap timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Diulas pula perbandingan pendaftaran tanah di berbagai negara, serta beberapa yurisprudensi seputar jual beli dan pendaftaran tanah yang dianalisis secara objektif dalam bingkai teori dan asas hukum pertanahan. Buku yang berkualitas ini patut dibaca oleh kalangan akademis, praktis hukum pertanahan, kalangan perbankan, aparat pemerintah, pihak pengembang, dan masyarakat umum yang ingin memahami dengan baik eksistensi dan permasalahan hak atas tanah dan pendaftarannya di tanah air.

Property Top Secret Buku Pintar Bisnis & Investasi Properti di Era Revolusi Industri 4.0 Media Pustaka Indo

?Sangat bermanfaat. Sangat saya rekomendasikan sebagai pedoman dan rujukan awal.? ?Prof.

Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar FHUI ? Apakah Perjanjian Jual Beli tanah antara orangtua dan anak, atau antara suami dan istri itu sah menurut hukum? ? Saya akan membeli rumah, tetapi nama yang tercantum di sertifikat bukan nama si penjual, mengapa dan bagaimana seharusnya? ? Saya menikah dengan WNA, lalu bagaimana status tanah warisan saya? ? Pada dokumen tanah yang akan saya beli, ternyata pihak kantor pajak menerbitkan tagihan PBB ganda, bagaimana dan ke mana saya harus melakukan verifikasi? Masalah kenotariatan dan pertanahan merupakan masalah yang akrab dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, kebanyakan orang merasa ?asing? dengan masalah ini. Untuk itu, berdasarkan pengalamannya belasan tahun selaku praktisi, pengajar, dan pelatih kenotariatan, penulis menghadirkan serial Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer. Penulis menyertakan banyak ilustrasi, contoh kasus, dan analogi dalam kehidupan sehari-hari. Tanya jawab masalah yang sering muncul pun menyertai pembahasan tentang Hukum Pertanahan ini. Ini memberikan wacana baru bahwa mempelajari dan menerapkan hukum itu sangat mudah dan praktis. Tak hanya masyarakat awam yang akan mendapatkan kiat praktis sebelum meminta bantuan notaris, para mahasiswa hukum dan/atau kenotariatan akan memperoleh pencerahan pula. Bahkan, para praktisi hukum akan mendapatkan alternatif solusi dalam menangani kasus pertanahan. [Mizan, Kaifa, Hukum, Panduan, Indonesia]

HUKUM AGRARIA Sinar Grafika

Buku ini terbagi menjadi 8 (delapan) Bab. Bab Satu membahas sejarah dan karakteristik PPAT di Indonesia. Bab Dua membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian PPAT. Bab Tiga membahas hak dan kewajiban PPAT. Bab Empat membahas tentang administrasi perkantoran PPAT. Bab Lima membahas sanksi administratif serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PPAT. Bab Enam tentang organisasi profesi dan kode etik PPAT. Bab Tujuh membahas tentang akta akta PPAT dan terakhir Bab Delapan membahas tentang prinsip kehati-hatian PPAT dalam pelaksanaan tugas jabatan. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

ASPEK HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN RAIH ASA SUKSES Pendaftaran peralihan hak atas tanah merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dengan dilaksanakannya pendaftaran peralihan hak atas tanah akan mewujudkan tertib administrasi pertanahan, yang mana hal ini akan mengeliminir terjadinya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Buku ini membahas secara komprehensif mengenai problematika dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, di antaranya yaitu pendaftaran peralihan hak atas tanah yang membutuhkan biaya yang mahal, prosedur pendaftarannya berbelit-belit serta memakan waktu yang berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kemudian juga membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Aplikasi sentuh tanahku, Sertifikat Elektronik dan juga program PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) yang masih terdapat berbagai permasalahan. Tidak hanya membahas secara komprehensif mengenai problematika dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, buku ini juga menawarkan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mengurai dan menyelesaikan berbagai problematika tersebut.

Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakad Media Publishing Profesor Doktor Mariam badruzaman, S.H., FCBarb, mengemukakan secara komprehensif pemikiran-pemikirannya tentang hukum benda pada umumnya dan tentang tanah beserta benda yang di atasnya, terdiri atas bangunan dan rumah susun. Tentang benda yang ada dalam tanah tidak menjadi objek pembahasan dalam buku ini, karena benda yang ada dalam tanah merupakan subsistem dari hukum tanah yang menempati posisi sebagai kekayaan negara. pembahasan tentang hukum benda nasional dalam buku ini mencakup; BAB I: Hukum Benda Pada Umumnya; BAB II: Kedudukan Berkuasa (Bezit); BAB III: Hak Milik Pada Umumnya; BAB IV: Hukum Tanah; BAB V: Hukum Rumah Susun; BAB VI: Hukum Bangunan Gedung.

SERI IKHTISAR HUKUM EKONOMI DAN BISNIS BUKU I: PENGANTAR HUKUM EKONI Penerbit Alumni penulisan buku ini membahas bagaimana menemukan konstruksi hubungan hukum antara penyelenggaraan pembangunan rumah susun dengan pembeli dalam peralihan hak milik atas satuan rumah susun dan juga untuk menemukan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pembeli. Selesaiannya buku ini tidak lepas dari bantuan ber-bagai pihak yang telah memberikan saran dan masukan terkait materi buku ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Rektor Universitas Narotama Surabaya yang terus mendo-rong Penulis untuk menghasilkan karya tulis yang ber-manfaat bagi dunia akademis. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas Hukum Naro-tama Surabaya.

Hukum Agraria Airlangga University Press

Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam Vendu Reglement dan peraturan pelaksanaannya. Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab kesatu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang, dan sumber hukum lelang. Bab kedua mengenai pengertian dan perlingkupan lelang terkait dengan istilah dan pengertian lelang serta perbedaannya dengan tender, asas-asas lelang, keunggulan dan fungsi lelang, peran dan manfaat lelang, macam-macam lelang dan kebendaan dalam pelelangan. Bab ketiga mengenai subjek dan penyelenggara lelang yang terkait dengan pejabat lelang, penjual dan pembeli lelang, penyelenggara lelang dan pengawas lelang. Bab keempat mengenai persiapan dan pelaksanaan lelang, termasuk tata cara pembuatan risalah lelang. Buku ini diakhiri dengan bab kelima mengenai hal-hal yang terkait dengan biaya jasa pelayanan lelang dan administrasi perkantoran lelang oleh KPKNL maupun Balai Lelang. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, penyelenggara lelang, birokrat, pemerintah, dan peminat hukum lainnya yang berkeinginan memahami ketentuan hukum pelelangan di Indonesia dan untuk melengkapi khazanah perpustakaan.

Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bumi Aksara

Buku ini berisi hampir 50 artikel yang merupakan kumpulan tulisan Ahmad Nashih Luthfi selama kurang lebih satu dekade terakhir (2008-2019). Tulisan asli yang dihimpun dalam buku ini semula adalah dari bab suatu buku, artikel jurnal, esai yang diterbitkan di majalah, media massa cetak atau online, makalah diskusi atau ceramah, dan beberapa tambahan artikel atau catatan singkat yang belum pernah diterbitkan. Berbagai tulisan tersebut dikelompokkan di dalam buku ini secara tematis dari Bab I sampai Bab IX. Berbagai artikel yang ada dikelompokkan ke dalam sepuluh bab, yakni tentang Islam dan Agraria; Tokoh dan Pemikiran Agraria; Sejarah Land Reform dan Pelaksanaan Reforma Agraria Kini; Kajian Agraria Kepulauan; Pendidikan, Kelembagaan dan Politik Agraria Kontemporer; Perubahan Agraria di Yogyakarta; Transformasi Agraria Pedesaan; Tanah Adat, Ulayat, dan Komunal; Review Buku Tema Agraria. Apa yang dimaksud sebagai "membangun bersama rumah agraria" adalah bahwa kajian agraria dan pertanahan memerlukan kerjasama banyak pihak, sebab sangat kuat memiliki daya dorong agar ia tidak saja menantang secara akademik, namun juga relevan secara sosial, dan kontributif secara kelembagaan. Kajian ini bersifat transformatif mengidealkan suatu tatanan yang lebih adil, sehingga membutuhkan engagement di level kebijakan/negara dan masyarakat. Agar dapat berlaku demikian, maka muncul tantangan agar keilmuan yang dikaji tidak jatuh pada cliché namun secara kritis terus menerus mengembangkan sekaligus mempertanyakan keterbatasannya, sebagai hasil dialektika tidak berkesudahan antara (1) ranah kebijakan, gerakan, dan studi; (2) bergerak bolak balik dalam persinggungan antara yang lokal, nasional, dan global; dan (3) sedimentasi yang ditinggalkan oleh masa lalu, memberi tilasan empiris pada masa kini, dan kreativitas pada masa depan. Deskripsi dan analisa terhadap masalah agraria mendahului preskripsi yang kadangkala disajikan secara klise. Rumah agraria itu yang dimaksud, dan betapa: sangatlah tidak sederhana hal itu! Membangun bersama rumah agraria yang ditopang oleh pilar-pilar triangulasi (serba segi tiga) itu merupakan suatu kesadaran dan ikhtiar panjang yang melintasi formalitas lembaga, disiplin ilmu, pertemanan, kota dan kepulauan.

Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia Penerbit NEM

Buku ini berisi tentang berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, yang seharusnya penegakkannya dilandasi dengan nilai-nilai keadilan maupun keagamaan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena hukum hadir untuk menjamin keadilan setiap warga negara Indonesia. Tujuan tim penulis membuat buku ini, selain untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta juga sebagai kontribusi penulis untuk pembangunan (penegakan) hukum di Indonesia.

Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku ini menjelaskan hak - hak yang ada dalam kepemilikan tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bngunan, Hak Pakai, Hak Sewa, dan Hak atas Tanah yang Bersifat Sementara.

Dibahas juga tentang tata cara peralihan hak atas tanah melalui, Jual Beli, Tukar-menukar, Pewarisan dan Lelang. Buku ini memberikan pemahaman dan pedoman penting bagi akademisi di bidang hukum agraria, praktisi, mahasiswa, maupun semua pihak yang terkait urusan peralihan hak atas tanah. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup

TEORI DAN PRAKTEK HAK TANGGUNGAN Gramedia Pustaka Utama

Warisan kerap luput dari perhatian masyarakat serta banyak sekali disalahartikan dalam masyarakat di Indonesia. Warisan sangat identik dikaitkan dengan hal apabila seseorang meninggal dunia, harus dapat kita pahami bila seseorang meninggal dunia hubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, bila seseorang memiliki keluarga maka akan terjadinya hubungan hukum terkait harta benda yang ditinggalkan, itulah yang kita sebut dengan warisan. Buku ini secara lebih mendalam lagi membahas mengenai sistem pewarisan menurut Hukum Perdata Barat, Pewarisan menurut Hukum Islam, dan Pewarisan menurut Hukum adat, dengan adanya ketiga sistem tersebut belum secara penuh dapat dipahami oleh masyarakat dan berlaku secara nyata didalam masyarakat, sehingga pembahasan mengenai ketiga sistem pewarisan ini sangatlah penting. Pembahasan mengenai ketiga sistem pewarisan tersebut, tidak lepas juga dari pembahasan mengenai mengenai perkawinan, dan juga kematian yang akan berujung pada sistem pewarisan. Pembahasan mengenai sistem pewarisan juga berkenaan dengan pewarisan dalam dan antar golongan, dan juga menyangkut mengenai ahli waris baik ahli waris sebagai WNI maupun WNA. Untuk mempermudah pembaca dalam mencari solusi setiap kasus yang dialami maka dalam buku ini kami menyajikan bukan hanya teori yang menjadi dasar dari pewarisan akan tetapi kami memberikan contoh-contoh kasus yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari didalam masyarakat beserta dengan solusinya.

Hukum Lelang Muhammadiyah University Press

Buku ini merupakan kumpulan studi terhadap dinamika hukum agraria dan ekonomi yang terkait dengan problem di atas, seperti pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, pembatasan luas penguasaan dan pemilikan tanah, bank tanah, dan konflik agraria. Agar lebih aktual, isu mutakhir menyangkut pemberlakuan kebijakan UU Cipta Kerja (yang kemudian diubah melalui Perppu Cipta Kerja) yang berimplikasi pada aspek agraria juga dikaji dalam buku ini.

Awaz Jangan Beli Tanah Sengketa CV. Beta Aksara

Dorongan penulisan buku literatur ini muncul terutama dari pengalaman-pengalaman penulis

sebagai dosen karena pada kenyataannya masih terbatas buku yang membahas tentang Hukum Agraria secara komprehensif. Penulis berharap dengan hadirnya buku literatur ini dapat membantu khususnya mereka yang mendalami hukum Agraria baik mahasiswa, praktisi, dosen atau para pemerhati di bidang kajian Hukum Agraria.

Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya Kaifa

Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak, terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum, tentang ketentuan umum pendaftaran tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Sari laporan penelitian dan survei, 1950-1980 Penerbit Andi

Banyaknya terjadi penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing dan badan hukum, sehingga mendorong penulis untuk menerbitkan buku ini dari hasil disertasi penulis guna memberikan pengetahuan dan mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna meluluskan keinginannya yang melanggar aturan hukum yang ada. Sehingga perlu diketahui oleh pembaca agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum atas kepemilikan tanah yang dikehendakinya. Sistem pertanahan nasional yang dapat memberikan sarana dalam mengatur sumber daya alam tersebut untuk mencapai pembangunan yang diharapkan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang meliputi objek hak atas tanah, subjek hak atas tanah dan status objek hak atas tanah.

Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh? Bhuana ilmu populer

Tujuan utama pengembangan wilayah adalah pemerataan pengembangan antarwilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi wilayah. Dalam perencanaan pengembangan wilayah perlu didukung ilmu lain yang berhubungan dengan pengembangan fisik dan ekonomi wilayah, seperti ilmu evaluasi dan perencanaan penggunaan sumber daya lahan, ilmu penataan ruang dan pengembangan kawasan, ilmu pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, ilmu pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ilmu pemekaran wilayah administrasi. Di dalam buku ini membahas berbagai konsep perencanaan pendukung pengembangan wilayah, dimulai dari konsep tipologi dan teori pengembangan wilayah, seperti teori lokasi, pusat pertumbuhan, dan agropolitan. Di dalam perencanaan pengembangan wilayah perlu didukung evaluasi dan perencanaan penggunaan lahan baik secara fisik maupun sosial ekonomi, perencanaan pengembangan kawasan dan penataan ruang, agar pengembangan wilayah yang direncanakan dapat saling bersinergi bukan saling berantagonis. Perencanaan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan sangat diperlukan dalam perencanaan pengembangan wilayah yang banyak berhubungan dengan pengelolaan lahan perkotaan dan prasarana kota. Pengembangan wilayah pesisir juga termasuk dalam perencanaan pengembangan wdayah yang membahas pengembangan potensi dan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang sangat berpotensi dalam pengembangan fisik maupun sosial ekonomi wilayah. Fenomena pemekaran wilayah yang banyak dilakukan saat ini perlu pula dicermati karena fenomena ini juga termasuk dalam ranah pengembangan wilayah, yaitu pengembangan wilayah administrasi. Kelayakan Pemekaran Wilayah

juga dibahas dalam buku ini karena berhubungan dengan pengembangan wilayah administrasi, yang membahas dan mengevaluasi berbagai faktor penunjang pemekaran wilayah seperti kependudukan, kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, kemampuan keuangan daerah,

kondisi Polbudhankam, kesejahteraan, luas daerah dan rentang kendali, untuk mengetahui apakah pemekaran wilayah yang dimaksud sudah layak atau belum. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Related with Tata Cara Peralihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Akta:

- Sandinista Contreras Conflict In Nicaragua Ap World History : [click here](#)